

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan surat edaran dari Kementrian Sosial Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten, mengenai pemberian Dana Desa di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Sesuai dengan dengan ketersediaan anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, salah satu wilayah di Kecamatan Trimurjo yang mendapatkan anggaran pemberian dana desa jamianan sosial keluarga adalah Kampung Tempuran

Kampung Tempuran berdiri pada tahun 1936 oleh pemerintah kolonial Belanda di mana seluruh penduduknya berasal dari pulau Jawa sebanyak 445 kepala keluarga yang dibagi menjadi 3 (tiga) bedeng antara lain Bedeng 12A, Bedeng 12B, Bedeng 12C. Semula Tempuran bernama Endromulyo, pergantian nama tersebut dikarenakan pada agresi 1949 (2 Februari 1949), Kampung Tempuran menjadi ajang pertempuran melawan penjajah dan berhasil mengalahkannya. Dari peristiwa tersebut maka tahun 1951, Endromulyo berubah nama menjadi Tempuran.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat, mekanisme pemberian Dana Desayang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desaaagar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desasini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desaini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Pemberian Dana Desa diberikan berdasarkan nama peserta penerima Dana Desa yang di ajukan oleh BPS. BPS adalah Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Karena jumlah penduduk miskin lebih banyak dari pada danadesa yang di berikan. Maka tahapan selanjutnya pihak kelurahan melakukan survey untuk tindakan selanjutnya untuk menentukan nama peserta penerima atas dasar acuan nama yang diajukan oleh BPS. Untuk memberikan pelayanan pemberian dana desa yang terbuka kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan lembaga pemerintah, agar dugaan yang beredar di masyarakat Tindakan survey yang di lakukan oleh pihak kelurahan tidak merata, terkadang lebih memprioritaskan penerima yang dekat dengan lingkungan kelurahan. Maka di perlukan tindakan tepat dari pihak kelurahan agar pembagian tepat sasaran dan terbuka salah satunya dengan adanya sistem pendukung keputusan. Sistem Pendukung Keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer (termasuk sistem berbasis pengetahuan (manajemen pengetahuan)) yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Maka dari itu sistem pendukung keputusan adalah salah satu solusi untuk membantu pembagian danadesa agar merata. Metode *Profile Matching* proses perhitungan, pada metode *Profile Matching* diawali dengan pendefinisian nilai minimum untuk setiap variabel-variabel penilaian. Metode profile matching dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang telah ditentukan, dalam hal ini kandidat yang dimaksudkan yaitu menentukan penerima Dana Desa berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan.

Setelah mengetahui pentingnya sistem pendukung keputusan membantu kelancaran dalam menentukan penerima Dana Desa di Kelurahan Tempuran, maka penulis ingin melakukan penelitian pembagian dana bergulirdesa bergulir di Kelurahan Tempuran.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan pembagian dana desa tepat sasaran?
2. Bagaimana menerapkan metode Profile Matching/GAP sistem pendukung keputusan dan bergulir desa menggunakan berbasis web?

1.3 Batasan Masalah

Dengan banyaknya bagian-bagian masalah yang timbul pada yaitu:

1. Sistem Pendukung Keputusan yang di buat untuk menentukan penerima bedah rumah, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, subsidi listrik.
2. Sistem merekomendasikan tingkat penilaian berdasarkan nilai tertinggi berdasarkan kreteria yang dimasukan.
3. Unsur yang menjadi tolak ukur yaitu ;
Kreteria untuk dana yang di berikan ke warga antara lain penghasilan minimal, sumber penerangan, makan perhari, bahan bakar masak, konsumsi sumber protein (daging sapi, ayam, telur dll), jumlah pakaian, sumber air minum, luas tanah, luas bangunan, jenis dinding, jenis lantai, kondisi MCK(mandi cuci kakus), kemampuan berobat, ijazah terakhir, kemampuan cicilan kendaraan dan elektronik, luas sawah atau kebun(jika di miliki).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Membangun sistem pendukung keputusan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan pembagian dan bergulir tepat sasaran .
2. Menerapkan metode Profile Matching/GAP pada sistem pendukung keputusan penentuan penerima Dana Desa.

1.5 Manfaat yang Diharapkan

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat sistem pendukung keputusan dapat membantu penentuan penerima Dana Desa tepat sasaran.
2. Bagi ilmu pengetahuan dapat menambah dan memberikan sumbangpemikiran tentang penggunaan teknologi informasi di daerah.
3. Bagi lembaga pemerintahan dapat meningkatkan kinerja lembaga, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

1.6 Tinjauan Pustaka

1. Hasan Dkk, (2014),Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Pada dasarnya penyelenggaraan sertifikasi guru secara legal didasarkan atas UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Berdasar Peraturan Pemerintah tersebut, proses sertifikasi bagi para guru dalam jabatan dilakukan dengan penilaian terhadap portofolio.Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah membuat sistem pendukung keputusan penilaian sertifikasi guru berbasis komputer dan kemudahan dalam pengarsipan.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis berpendapat untuk membuat sebuah sistem pendukung keputusan penilaian sertifikasi guru menggunakan metode GAP/Profil Matching. Pembuatan sistem pendukung keputusan penilaian sertifikasi guru ini meliputi : penginputan komponen portofolio dan penilaian data komponen portofolio, selisih total penilaian terhadap standarisasi total nilai ini merupakan dasar rekomendasi pengambilan keputusan untuk menentukan kelulusan sertifikasi. Dengan adanya Penggunaan Sistem penunjang keputusan Penilaian Sertifikasi Guru ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan serta kemudahan dalam pengarsipan berbasis komputer.

2. Mufid, (2014), Penilaian proposal dalam kegiatan PNPM-MPd belum berjalan secara cepat dan obyektif. Tujuan penelitian ini adalah membuat perangkat lunak untuk membantu tim verifikasi dalam melakukan penilaian proposal secara obyektif menggunakan metode profile matching dan analytic hierarchy process (AHP). Metode profile matching digunakan untuk memberikan penilaian, penentuan gap, dan pembobotan kriteria. Sedangkan metode AHP digunakan untuk menghitung matrik perbandingan berpasangan, eigen, skala prioritas, eigen maksimal, consistency index (CI) dan consistency ratio (CR). Nilai CR digunakan untuk menentukan urutan proposal yang akan didanai oleh BLM. Hasil akhir dalam penelitian ini adalah perangkat lunak sistem pendukung keputusan untuk penilaian proposal PNPM-MPd yang dapat menentukan ranking nilai dari yang tertinggi sampai terendah.
3. Irwan, (2013), Pengisian jabatan yang kosong pada proses kenaikan jabatan sering mengalami kesulitan karena pengajuan calon kandidat yang bisa menempati jabatan tersebut dengan cara pencocokan profil karyawan dan profil jabatan kurang terdefinisi dengan baik. Untuk meminimumkan kendala tersebut diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat menganalisa beberapa karyawan yang sesuai dengan profil jabatan yang ada. Sistem pendukung keputusan untuk proses profile matching dan analisis gap ini dibuat berdasarkan data di PT. Industri Kemasan Semen Gresik (PT. IKSG). Proses Profile Matching dilakukan untuk menentukan rekomendasi karyawan dalam Sistem Kenaikan Jabatan dan perencanaan karir berdasar pada 3 variabel yaitu Pengetahuan dan Budaya Perusahaan, Kemampuan, serta Kepribadian. Hasil dari proses seleksi berupa skor akhir karyawan sebagai rekomendasi bagi pengambil keputusan untuk memilih karyawan yang cocok pada jabatan yang kosong tersebut.
4. Ananta, Dkk, (2013), Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penilaian Kinerja Pegawai Untuk Kenaikan Jabatan

Pegawai menggunakan Metode Gap Kompetensi (Studi Kasus Perusahaan Perkasa Jaya Compuretail) Penilaian kinerja pegawai merupakan proses penilaian yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan pegawai yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Manajer Perusahaan Perkasa Jaya Compuretail memiliki permasalahan untuk bisa mengevaluasi (dalam hal ini memberikan penilaian) atas kinerja pegawai. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini mengadopsi pada model waterfall, penelitian dimulai dengan tahap requirements engineering yang terdiri dari perencanaan, penelitian, dan analisis. Kemudian mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan dasar-dasar sistem pendukung keputusan dan gap kompetensi yang menjelaskan rumus-rumus yang dipakai dalam gap kompetensi tersebut. Penelitian yang dibuat menghasilkan sebuah sistem Pendukung keputusan yang dapat menghitung tingkat kelayakan pegawai untuk menempati suatu jabatan tertentu dan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan untuk penilaian kinerja pegawai.

5. Supriatin, Dkk, (2014) „Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima BLSM Di Kabupaten Indramayu . Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (yang selanjutnya disebut BLSM) adalah kompensasi yang diberikan pemerintah kepada orang miskin guna mengurangi beban ekonomi yang semakin menekan kehidupan mereka, sebagai akibat naiknya harga BBM yang membawa dampak membubunginya harga kebutuhan pokok. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menyatakan bahwa penyaluran BLSM tidak tepat sasaran, ada BLSM yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi, namun terkadang masih ada masyarakat kaya yang juga menerimanya khususnya di kabupaten Indramayu, hal tersebut menyulitkan pihak penyeleksi dalam mengadakan penyeleksian calon penerima dana BLSM ini untuk itu dibuat sistem pendukung keputusan dalam menentukan penerima BLSM di kabupaten Indramayu dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Tujuan

penelitian ini adalah Memberikan usulan untuk prioritas penerima BLSM agar tepat sasaran dan dapat membantu pemerintah kabupaten indramayu dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode AHP, maka dapat dihasilkan suatu alternatif pengambilan keputusan dalam menentukan penerima BLSM yang efektif yang dapat menyaring 39% masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan BLSM.